

# Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit

Hanny Purnomo<sup>1</sup>

Rizky Eriandani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Indonesia

\*Correspondences: [hannyprnm@staff.ubaya.ac.id](mailto:hannyprnm@staff.ubaya.ac.id)

## ABSTRAK

Sebagai komponen tata kelola perusahaan, komite audit beserta auditor eksternal memiliki fungsi sebagai pengawas independen atas laporan keuangan, manajemen risiko dan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan. Penelitian menguji hubungan Efektivitas Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak perusahaan dengan peran moderasi dari Kualitas Audit. Menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini menguji 215 perusahaan manufaktur untuk periode 2019-2021 dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa komite audit yang efektif beserta dengan kualitas audit dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Kata Kunci: Efektivitas Komite Audit; Kualitas Audit; Penghindaran Pajak.

### *Effect of Audit Committee Effectiveness and Tax Avoidance: the Moderating Role of Audit Quality*

## ABSTRACT

*As a component of corporate governance, the audit committee and external auditors have functions as independent supervisors on financial reports, risk management and overseeing the company's compliance with laws and regulations. This study examines the relationship between the effectiveness of the audit committee on corporate tax avoidance and the moderating role of audit quality. Using purposive sampling technique, this study tested 215 manufacturing companies for the period 2019-2021 using multiple linear regression analysis techniques. This study shows the results that an effective audit committee along with audit quality can reduce corporate tax avoidance activities.*

Keywords: Effective Audit Committee; Audit Quality; Tax Avoidance.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 7  
Denpasar, 26 Juli 2022  
Hal. 1743-1756

DOI:  
10.24843/EJA.2022.v32.i07.p06

## PENGUTIPAN:

Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1743-1756

## RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
6 Juli 2022  
Artikel Diterima:  
25 Juli 2022

## PENDAHULUAN

Sebagai elemen vital yang memiliki fungsi sebagai penopang anggaran pendapatan negara, pajak memiliki peran penting. Di Indonesia sendiri, sektor pajak menyumbang penerimaan pendapatan negara dengan presentase yang tertinggi, sehingga dapat dikatakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pajak memiliki sifat yang memaksa, di mana setiap wajib pajak diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban pajak yang tinggi dapat menyebabkan wajib pajak berinisiatif melakukan beberapa upaya untuk menekan pembayaran pajak perusahaan melalui penghindaran pajak, yang tentunya akan berdampak pada turunnya pendapatan negara (Puspita & Febrianti, 2017). Pemerintah mengharapkan wajib pajaknya patuh, yang tercermin dari kesesuaian pembayaran pajak dengan kondisi yang sebenarnya yang akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang pada akhirnya mensejahterakan pemilik perusahaan. Dalam memaksimalkan laba terdapat kendala yang dihadapi perusahaan yaitu adanya beban yang dikeluarkan oleh perusahaan khususnya pajak kepada pemerintah yang berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan, berupaya untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara legal maupun nonlegal (Puspita & Harto, 2014) dan (Rahayu, 2014).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus perusahaan rokok milik British American Tobacco melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dengan cara mengalihkan sebagian dari pendapatannya, BAT menggunakan 2 cara. Cara pertama, dengan melakukan pinjaman antar perusahaan di periode tahun 2013 dan 2015. Selanjutnya, BAT melakukan pembayaran biaya, royalti dan layanannya ke Inggris. Pembayaran bunga atas pinjaman ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia, dengan kesepakatan pengurangan pajak untuk royalti atas merek dagang adalah 15%, maka dari itu Indonesia kehilangan pendapatannya hingga \$ 2,7 juta per tahunnya ([www.kotan.id](http://www.kotan.id)).

Penghindaran pajak adalah kegiatan yang dapat menimbulkan manajemen oportunistik, antara lain memanipulasi keuntungan yang dapat merugikan pemilik serta para *stakeholder*. Dalam mengambil keputusan yang bersifat oportunistik pihak manajemen lebih mementingkan kepentingannya sehingga kepentingan dari pihak pemilik akan terabaikan. Hal tersebut membuat pemilik perusahaan akan menghadapi risiko dari penghindaran pajak (McGuire *et al.*, 2012). Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap manusia egois dan berpusat pada diri sendiri atas dasar individunya. Teori keagenan Jensen and Meckling (1976) juga menyiratkan adanya asimetri informasi yang timbul antar pihak *agent* dan *principal*. Sebagai pengelola operasional perusahaan, manajer perusahaan memiliki lebih informasi terkait dengan internal perusahaan sehingga kan terdapat celah informasi antara *agent* dan *principal*. Manajemen berperan sebagai pengambil keputusan terkait dengan operasional perusahaan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak perusahaan, akan tetapi dalam hal perencanaan

pajaknya akan sangat berkaitan dengan *good corporate governance* yang ada (Dyreng *et al.*, 2008) dan (Friese *et al.*, 2008).

Perusahaan yang secara agresif melakukan penghindaran pajak akan berdampak terhadap penurunan reputasi yang dimiliki oleh perusahaan serta akan timbul risiko litigasi jika nilai tarif pajak efektif perusahaan terlalu rendah (Gallemore *et al.*, 2014). Seiring perkembangan jaman, masyarakat dan investor pun semakin memiliki sikap yang kritis terhadap penyimpangan etika dari strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Amazon dan Google (Barford & Holt, 2013). Biaya litigasi yang timbul dari kasus ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai penghematan pajak dari strategi penghindaran pajak yang dilakukan, sehingga akan secara signifikan mempengaruhi nilai dan reputasi dari perusahaan (Hanlon & Slemrod, 2009). Dewan direksi merupakan bagian dari tata kelola yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pemegang saham (Baysinger & Butler, 2019). Untuk mengelola risiko dari pajak secara tepat, maka diperlukan peran pengawasan baik secara internal dan eksternal (Drake *et al.*, 2019)

Dewan harus mendelegasikan wewenangnya kepada beberapa komite agar kegiatan dan pengendalian berjalan secara efisien (Menon & Williams, 1994), (Merchant, 1987). Komite audit berperan membantu dewan dalam melakukan pengawasan terhadap risiko pajak yang mungkin timbul (Robinson *et al.*, 2012), (Zheng *et al.*, 2018). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 55/POJK.04/2015 yang membahas mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tercantum bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam melakukan peninjauan dan pengontrolan dalam proses pelaporan keuangan termasuk pengendalian internal. Dengan harapan komite audit dapat melaksanakan pengawasan aktif terhadap operasional serta proses pelaporan perusahaan, sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan sudah melakukan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjalankan bisnis sesuai dengan etika (Robinson *et al.*, 2012).

Komite audit dipandang sebagai aspek penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Komite audit yang efektif memiliki peran besar membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan (Purnomo & Bernawati, 2019). Efektivitas dari komite audit dapat dilihat dari dua hal antara lain, sisi input yang terdiri dari kewenangan yang dimiliki, kualifikasi serta jumlah dari komite audit, sisi lainnya yaitu proses yang mana komite audit harus memiliki etos kerja tinggi sehingga melalui kedua sisi tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan, manajemen risiko serta pengendalian internal yang memenuhi (DeZoort *et al.*, 2002). Dalam laporan *Improving the Effectiveness of Corporate Audit, Committee* (1999) memaparkan terdapat beberapa karakteristik penting bagi komite audit antara lain frekuensi rapat, jumlah anggota, independensi serta kompetensi dari komite audit.

Komite audit harus memiliki anggota yang berintegritas, berkemampuan, berpengalaman serta memiliki pengalaman yang menunjang tanggung jawab serta bidang pekerjaannya, selain itu anggota komite audit juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik (Gendron & Bédard, 2006). Komite audit juga

wajib beranggotakan individu yang dapat memahami proses pelaporan keuangan, proses audit, bisnis perusahaan, manajemen risiko, undang-undang yang berlaku di pasar modal serta peraturan yang berlaku lainnya. Oleh karena itu, keberadaan komite audit akan mempengaruhi strategi perusahaan terhadap penghindaran pajak. Menurut ketentuan OJK no. 55/POJK.04/2015, komite audit wajib dibentuk oleh dewan direksi dengan sekurangnya terdiri dari tiga orang anggota yang diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris. Banyaknya anggota akan berpengaruh terhadap keberagaman, keterampilan dan pengalaman yang berdampak pada fungsi pengawasan yang efektif (Al-Matari *et al.*, 2012). Menurut Gebrayel *et al.* (2018) komite audit yang beranggotakan individu dengan kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga aktivitas penghindaran pajak akan terminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan tata kelola perusahaan, maka akan dapat membatasi terjadinya penghindaran pajak, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas (Arismajayanti & Jati, 2017), (Gebrayel *et al.*, 2018).

Dari perspektif teori keagenan, efektivitas komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi adanya agresivitas pajak, sehingga dapat mencegah timbulnya perilaku oportunistik dari pihak manajemen (Putra *et al.*, 2018). Deslandes *et al.* (2020) menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Lary and Taylor (2012) yang menyatakan bahwa komite audit yang independen adalah mekanisme tata kelola yang memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap penghindaran pajak. Komite audit yang beranggotakan individu dengan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi memiliki jadwal rapat yang lebih rutin serta memiliki independensi sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan meminimalkan aktivitas penghindaran pajak (Dang & Nguyen, 2022). Menurut uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Efektifitas komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, keterbukaan informasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan merupakan hal yang penting. Keterbukaan atau transparansi informasi tersebut dapat pula diukur melalui kualitas audit yang didefinisikan GAO (2003) sebagai proses audit yang dilakukan berdasarkan *Accepted Auditing Standards* dalam memberikan jaminan wajar bahwa audit atas laporan keuangan perusahaan serta pengungkapan telah sesuai tersaji. Dinilai sebagai salah satu atribut *Good Corporate Governance* yang efektif, dengan adanya audit yang berkualitas akan dapat melindungi para *stakeholder* dari perilaku oportunistik dan penipuan manajer (Kilgore *et al.*, 2011). Audit dengan kualitas tinggi akan meminimalkan motivasi manajemen untuk melakukan

penghematan pajak, dikarenakan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak manajemen apabila DJP mendeteksi adanya indikasi agresif pajak (Lestari & Nedya, 2019) dan (Pratiwi *et al.*, 2019).

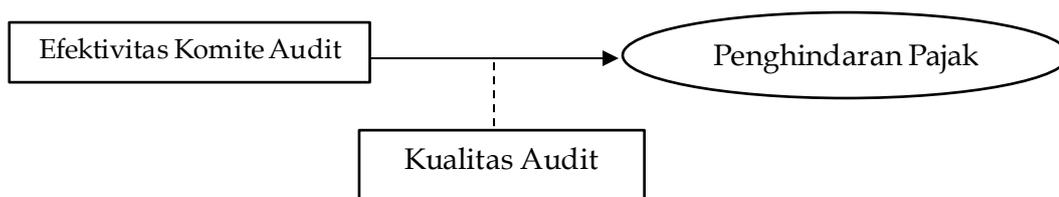
Menurut perspektif teori keagenan, kualitas audit memiliki peran penting dalam meminimalisir konflik agensi yang terjadi di perusahaan (Watkins *et al.*, 2004). Sebagai atribut dari tata kelola perusahaan, kualitas audit dapat mengontrol perilaku manajemen serta dapat melakukan pencegahan atas tindakan manipulasi serta penipuan (DeAngelo, 1981). Laporan keuangan diharapkan mendapatkan penilaian secara independen oleh auditor eksternal, yang mana auditor juga dapat melakukan penilaian apakah perusahaan melakukan perencanaan pajak agresif yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan (Gallemore *et al.*, 2014), (Guenther *et al.*, 2017). Auditor yang berkualitas cenderung berinsentif rendah dalam terlibat melakukan penghindaran pajak perusahaan, karna ada konsekuensi besar yang akan ditanggung jika DJP mendeteksi adanya penghindaran pajak yang agresif. Konsekuensi tersebut akan berdampak terhadap reputasi auditor serta kepercayaan publik atas perilaku penghindaran pajak (Hanlon & Slemrod, 2009). Kualitas audit dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik, di mana KAP yang berukuran lebih besar menghasilkan audit dengan kualitas yang lebih tinggi dan menawarkan kredibilitas yang tinggi (Lennox, 1999). Penelitian Guenther *et al.* (2017) menyatakan antara kualitas audit dan penghindaran pajak terdapat hubungan yang signifikan dan positif. Tandan and Winnie (2016) melakukan pengujian terhadap kualitas audit dengan proksi ukuran KAP dengan penghindaran pajak dan menunjukkan hasil hubungan yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Kualitas audit memperkuat hubungan antara komite audit terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya dengan mengkombinasikan fungsi pengawasan internal dan eksternal. Penelitian ini berkonteks pada keadilan dan transparansi yang menjadi tanggung jawab dari pihak manajemen kepada para *stakeholder* perusahaan, terutama pemerintah sehingga penting untuk mengurangi risiko dari penghindaran pajak melalui fungsi pengawasan. Penelitian ini juga berfokus pada komponen audit baik eksternal ataupun internal untuk melakukan pengawasan yang efektif sehingga dapat meminimalkan aktivitas penghindaran pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan eksplanatori, adapun model penelitian yang digunakan akan digambarkan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2022

Data yang digunakan merupakan data primer bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keuangan (*financial report*) perusahaan yang diperoleh dari website perusahaan langsung maupun website BEI dengan kriteria sampel yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya sektor manufaktur untuk periode tahun 2019-2021 yang terdiri dari sektor aneka industri, sektor industri dasar dan kimia serta sektor industri barang konsumsi. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini dalam melakukan penarikan sampel dengan pertimbangan antara lain: perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dan terpublikasi pada BEI untuk periode tahun 2019-2021; memiliki laba sebelum pajak yang bernilai positif; menyajikan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga data perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 215.

Adapun beberapa variable yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: variabel dependen yang berupa Penghindaran Pajak (Y), variabel independent meliputi Efektivitas Komite Audit (X) serta Kualitas Audit sebagai variabel moderasi (Z). Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak dalam mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan pajak yang berlaku. Variabel penghindaran pajak diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi pengukuran beban pajak yang umum digunakan. ETR merupakan ukuran penghindaran pajak perusahaan yang tepat untuk menilai perilaku penghindaran pajak perusahaan karena berberapa alasan. Pertama, ETR dapat menggambarkan segala bentuk pengurangan pajak melalui celah-celah peraturan yang terdapat pada undang-undang perpajakan (Dyreng *et al.*, 2017). Kedua, ETR merupakan fungsi kebalikan dari penghindaran pajak, nilai tarif efektif pajak yang rendah memperlihatkan aktivitas perusahaan yang lebih tinggi dalam penghindaran pajak (Frank *et al.*, 2009). *Effective Tax Rate* (ETR) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai total beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (Dyreng *et al.*, 2010), (Higgins *et al.*, 2015). Adapun perhitungan ETR sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pretax Book Income}} \dots\dots\dots(1)$$

Efektivitas komite audit (ACE) adalah potensi atau kemampuan dari komite audit untuk melakukan tugas serta tanggung jawab dalam hal pengawasan. Pengukuran efektivitas komite audit dalam penelitian ini menggunakan skor komposit gabungan, yang mana masing-masing karakteristik elemen dari komite audit akan bernilai dummy 0 atau 1. Elemen akan memperoleh

nilai 1 jika berada di atas nilai median sampel dan memperoleh nilai 0 jika berada di bawah nilai median sampel. Nilai dari skor komposit gabungan untuk ACE akan berkisar antara 0 hingga 4, di mana nilai 0 menunjukkan efektivitas yang terendah dan nilai 4 menunjukkan efektivitas yang tertinggi (Siam *et al.*, 2018). Efektivitas komite audit terbentuk dari gabungan empat karakteristik yang dimiliki oleh komite audit, yaitu: frekuensi rapat, jumlah anggota, independensi serta keahlian keuangan dari komite audit.

Sebagai salah satu komponen *Good Corporate Governance*, kualitas audit (AQ) dinilai efektif dalam melindungi para *stakeholder* dari perilaku oportunistik manajer. Audit dengan kualitas yang tinggi akan mengurangi motivasi pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak karena akan ada konsekuensi besar yang harus ditanggung apabila tarif efektif pajak perusahaan terlalu rendah. Pengukuran kualitas audit akan menggunakan variabel dummy, apabila perusahaan diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan big 4 akan mendapat nilai 1, sebaliknya apabila perusahaan diaudit oleh KAP yang tidak terafiliasi dengan big 4 akan mendapat nilai 0. Adapun KAP yang terafiliasi dengan big 4 di Indonesia yaitu: KAP *PriceWaterhouseCoopers*, KAP *Deloitte*, KAP *KPMG* dan KAP *Ernst and Young*.

Ukuran perusahaan (*FSize*), *Leverage* (*Lev*) dan *ROA* berperan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu variabel yang dibuat konstan atau dikendalikan sehingga faktor lainnya tidak mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen dalam penelitian ini. Sejumlah 215 selama tahun 2019-2021 menjadi sampel dalam penelitian ini, dengan berdasarkan kriteria penarikan sampel. Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Adapun dalam melakukan teknis analisis data digunakan beberapa teknik antara lain: uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan pengujian terhadap hipotesis dengan persamaan model sebagai berikut.

$$ETR = \alpha + \beta_1 ACE + \beta_2 FSize + \beta_3 Lev + \beta_4 ROA \dots \dots \dots (2)$$

$$ETR = \alpha + \beta_1 ACE + \beta_1 AQ + \beta_3 ACE * AQ + \beta_4 FSize + \beta_5 Lev + \beta_6 ROA \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

$\alpha$  = Konstanta

$ETR_{it}$  = Effective Tax Rate perusahaan  $i$  tahun  $t$

$ACE_{it}$  = Efektivitas Komite Audit perusahaan  $i$  tahun  $t$

$AQ_{it}$  = Kualitas Audit perusahaan  $i$  tahun  $t$

Variabel Kontrol:

$FSize_{it}$  = Ukuran perusahaan perusahaan  $i$  tahun  $t$

$LEV_{it}$  = Nilai Hutang perusahaan  $i$  tahun  $t$

$ROA_{it}$  = Net Income dibagi Total Aset perusahaan  $i$  tahun  $t$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2019-2021. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu di mana anggota sampel dapat mewakili populasi, sehingga data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 215 perusahaan sektor manufaktur untuk periode 2019-2021.

**Tabel 1. Proses Penentuan Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah Sampel
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021	538
Perusahaan yang menggunakan mata uang asing	(25)
Perusahaan yang menggunakan tanggal pelaporan selain 31 Desember	(63)
Perusahaan yang memiliki negatif pre-tax income	(97)
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap	(138)
Jumlah Sampel:	215

Sumber: Data Penelitian, 2022

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACE	215	0	3	0,69	0,72
AQ	215	0	1	0,48	0,50
FSIZE	215	23	33,49	28,75	1,68
LEV	215	0	46,55	0,67	3,18
ROA	215	-4,26	68,59	0,36	4,68
ETR	215	0,09	3,23	0,79	0,67
ACE*AQ	215	0	3,00	0,46	0,66
Valid N	215				

Sumber: Data Penelitian, 2022

ETR berperan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini yang merupakan proksi dari fungsi kebalikan penghindaran pajak perusahaan. Nilai rata-rata ETR untuk perusahaan manufaktur dalam penelitian ini sebesar 0,79, yang tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur relatif rendah dalam melakukan penghindaran pajak. Nilai tertinggi ETR sebesar 3,23 yang dimiliki oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat praktik penghindaran pajak yang rendah.

Efektivitas Komite Audit (ACE) berperan sebagai variabel independent dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,69 dengan nilai maksimum sebesar 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit pada perusahaan manufaktur untuk periode penelitian memiliki efektivitas yang relatif rendah. Selain itu variabel ACE memiliki nilai minimum sebesar 0, hal tersebut sesuai dengan ketentuan OJK no. 55/POJK.04/2015 yang mewajibkan perusahaan *go public* untuk memiliki komite audit yang minimal beranggotakan 3 orang.

Variabel kualitas audit (AQ) yang berupa variabel dummy dari kualitas audit eksternal menunjukkan sebanyak 48% perusahaan manufaktur dalam penelitian ini diaudit oleh KAP yang terafiliasi Big4 dan sisanya sebesar 52% tidak diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan Big4.

Dalam penelitian ini dilakukan Uji Asumsi Klasik agar mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini terbebas dari asumsi BLUE (*Best, Linear, Unbias, dan Error*). Adapun Pengujian Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Multikolinearitas Uji Normalitas serta Uji Heterokedastisitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Keterangan
Uji Normalitas	$p(0,20) > 0,05$	Berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	$VIF(2,14; 2,23; 3,31) > 0,1$	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heterokedastisitas	$p(0,28) > 0,05; p(0,77) > 0,05; p(0,59) > 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2022

**Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,21	1,00		3,21	0,002
ACE	0,67	0,08	0,51	8,31	0,000
FSIZE	0,07	0,04	0,13	2,09	0,038
LEV	-0,02	0,02	-0,08	-1,36	0,175
ROA	-0,01	0,01	-0,03	-0,44	0,664
Adjusted R Square	0,33				
Sig. F	0,00				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Setelah melakukan pengolahan data, hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan dan positif antara Efektivitas Komite Audit dan ETR. ETR merupakan fungsi kebalikan dari penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian ini ditemukan hubungan positif dan signifikan secara statistic antara efektivitas komite audit dan ETR pada tingkat 1% seperti yang ditunjukkan pada table 5, menunjukkan bahwa komite audit yang efektif dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan hipotesis pertama kami. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Deslandes *et al.*, 2020). Komite audit memiliki peran pengawasan di garis terdepan terkait dengan permasalahan keuangan dan risiko manajemen termasuk risiko pajak. Komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Adanya komite audit yang efektif akan membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite audit bertugas Bersama dengan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan untuk memastikan tidak adanya asimetri informasi, dengan cara memantau dan memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan pengendalian internal di dalam perusahaan (Asri & Suardana, 2016). Teori keagenan Watts and Zimmerman (1978) memberikan landasan teoritis luas yang menjelaskan bagaimana karakteristik komite audit memengaruhi pemantauan agresivitas pajak mereka. Seiring berkembangnya zaman, ruang lingkup dari komite audit juga telah brekembang dan mencakup bidang-bidang seperti manajemen risiko, teknologi informasi, dan globalisasi, dan komite audit juga sekarang dipandang memainkan peran penting dalam pengelolaan risiko pajak (Hutchens & Rego, 2015) dan (Richardson *et al.*, 2015). Oleh karena itu, dan khususnya mengingat kompleksitas seputar masalah pajak, anggota komite audit yang efektif berada dalam posisi untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pajak perusahaan.

Terdapat banyak celah dalam peraturan perpajakan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan motivasi pihak manajemen untuk dapat memanfaatkannya dalam hal mengurangi pembayaran pajak ke negara yang dapat menimbulkan risiko yang berujung pada sanksi dan berpengaruh kepada reputasi perusahaan. Komite audit yang berperan sebagai salah satu komponen pengawasan dalam perusahaan, memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa manajemen telah melakukan operasional perusahaan sesuai dengan standard dan aturan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan secara konsisten. Adanya komite audit yang efektif akan menunjukkan kualitas tata kelola perusahaan yang tinggi, hal tersebut merupakan baik bagi perusahaan dikarenakan adanya fungsi pengawasan yang efektif dapat mengurangi kemungkinan pihak manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Komite audit dapat menjalankan tanggung jawab fungsi pengawasannya dan memastikan penyajian laporan keuangan perusahaan serta operasional perusahaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan komite audit dapat melihat secara langsung kegiatan yang dilaksanakan perusahaan.

**Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,80	0,52		1,46	0,145
ACE	0,33	0,06	-0,25	4,69	0,000
AQ	1,63	0,09	0,86	19,15	0,000
ACE*AQ	0,16	0,09	-0,11	2,06	0,040
FSIZE	-0,03	0,02	-0,05	-1,36	0,173
LEV	-0,02	0,01	-0,05	-1,58	0,114
ROA	0,00	0,01	-0,08	-0,24	0,809
Adjusted R Square	0,82				
Sig. F	0,00				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil lainnya yang diperoleh adalah H<sub>2</sub> diterima. Hipotesis kedua menyatakan bahwa kualitas audit dapat memperkuat pengaruh dari efektivitas komite audit terhadap penghindaran pajak. Tabel 6. memperlihatkan hasil regresi untuk efek moderasi kualitas auditor terhadap efektivitas komite audit dan penghindaran pajak perusahaan dengan menggunakan proksi ETR. ETR merupakan fungsi kebalikan dari penghindaran pajak. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel interaksi ACE\*AQ dan ETR ( $p < 0,01$ ). ETR merupakan fungsi kebalikan dari penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan hasil tersebut sejalan dengan H<sub>2</sub> dalam penelitian ini dan sejalan pula dengan penelitian (Gaaya *et al.*, 2017) dan (Jihene & Moez, 2019).

Kualitas audit dapat dikatakan sebagai salah satu komponen *Good Corporate Governance* efektif karena dapat mengurangi perilaku oportunistik dan kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajer (Krisna, 2019). Kualitas audit bersama dengan komite audit dalam menjalankan fungsinya pengawasan terhadap pelaporan perusahaan dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak karena manajer kurang termotivasi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak jika diawasi dengan baik. Audit dengan kualitas yang baik dihasilkan dari KAP yang bereputasi yaitu KAP yang terafiliasi dengan *Big four*. Kantor akuntan

publik yang bereputasi memiliki intensif lebih dalam menerapkan standar pengungkapan yang lebih ketat dan luas berdasarkan peraturan yang berlaku dikarenakan mereka akan lebih banyak mengalami kerugian apabila kehilangan reputasi, sehingga akan menjaga reputasinya serta kepercayaan yang telah diberi oleh para *stakeholder*. Adanya sanksi terkait dengan kode etik akuntan publik juga menjadi pertimbangan utama apabila auditor melakukan kegiatan yang menyimpang.

### SIMPULAN

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap komponen-komponen tata kelola yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilihat dari Efektivitas Komite Audit serta Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode tahun 2019-2021. Dari pengujian yang telah dilakukan adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah komite audit yang efektif dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak perusahaan serta dengan adanya fungsi pengawasan dari auditor eksternal juga dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan sehingga dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Efektivitas komite audit beserta dengan audit yang berkualitas merupakan tata kelola perusahaan yang efektif untuk melakukan pengawasan terkait dengan permasalahan keuangan dan risiko manajemen termasuk risiko pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Data penelitian hanya tersebut mencakup 3 tahun periode. Sampel yang mencakup beberapa periode waktu lebih mungkin memberikan lebih banyak wawasan. Penelitian ini hanya menggunakan Kantor Akuntan Big Four sebagai proksi kualitas audit. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain dari kualitas audit serta dapat melihat perbandingan penghindaran pajak dari industri lain selain industri manufaktur.

### REFERENSI

- Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., Fadzil, F. H., & Al-Matari, Y. A. (2012). The impact of board characteristics on firm performance: Evidence from nonfinancial listed companies in Kuwaiti Stock Exchange. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2(2), 310-332.
- Arismajayanti, N. P. A., & Jati, I. K. (2017). Influence of audit committee competence, audit committee independence, independent commissioner and leverage on tax aggressiveness. *Journal of Auditing*, 5(2), 109-119.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 72-100.
- Barford, V., & Holt, G. (2013). Google, Amazon, Starbucks: The rise of 'tax shaming'. *BBC news magazine*, 21.
- Baysinger, B. D., & Butler, H. N. (2019). Corporate governance and the board of directors: Performance effects of changes in board composition. In *Corporate Governance* (pp. 215-238). Gower.

- Blue Ribbon Committee, B. (1999). Report and recommendations of the Blue Ribbon Committee on improving the effectiveness of corporate audit committees. *The Business Lawyer*, 1067-1095.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2023263.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183-199.
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*.
- DeZoort, F. T., Hermanson, D. R., Archambeault, D. S., & Reed, S. A. (2002). Audit committee effectiveness: A synthesis of the empirical audit committee literature. *Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature*, 21, 38.
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does tax risk affect investor valuation of tax avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151-176.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163-1189.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of financial economics*, 124(3), 441-463.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Friese, A., Link, S., & Mayer, S. (2008). Taxation and corporate governance – The state of the art. *Tax and corporate governance*, 357-425.
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*.
- Gallemore, J., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2014). The reputational costs of tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 31(4), 1103-1133.
- Government Auditing Standards, (2003).
- Gebrayel, E., Jarrar, H., Salloum, C., & Lefebvre, Q. (2018). Effective association between audit committees and the internal audit function and its impact on financial reporting quality: Empirical evidence from Omani listed firms. *International Journal of Auditing*, 22(2), 197-213.
- Gendron, Y., & Bédard, J. (2006). On the constitution of audit committee effectiveness. *Accounting, Organizations and Society*, 31(3), 211-239.
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? *The Accounting Review*, 92(1), 115-136.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public economics*, 93(1-2), 126-141.

- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). The influence of a firm's business strategy on its tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 32(2), 674-702.
- Hutchens, M., & Rego, S. O. (2015). Does greater tax risk lead to increased firm risk? Available at SSRN 2186564.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of audit quality on CEO compensation and tax avoidance: Evidence from Tunisian context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131.
- Kilgore, A., Radich, R., & Harrison, G. (2011). The relative importance of audit quality attributes. *Australian Accounting Review*, 21(3), 253-265.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(2), 82-91.
- Lary, A. M., & Taylor, D. W. (2012). Governance characteristics and role effectiveness of audit committees. *Managerial Auditing Journal*.
- Lennox, C. S. (1999). Audit quality and auditor size: An evaluation of reputation and deep pockets hypotheses. *Journal of Business Finance & Accounting*, 26(7-8), 779-805.
- Lestari, N., & Nedya, S. (2019). The effect of audit quality on tax avoidance. International Conference On Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (iCASTSS 2019),
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Wang, D. (2012). Tax avoidance: Does tax-specific industry expertise make a difference? *The Accounting Review*, 87(3), 975-1003.
- Menon, K., & Williams, J. D. (1994). The use of audit committees for monitoring. *Journal of accounting and public policy*, 13(2), 121-139.
- Merchant, K. A. (1987). How and why firms disregard the controllability principle. *Accounting and management: Field study perspectives*, 316-338.
- Pratiwi, N., Subekti, I., & Rahman, A. F. (2019). The effect of corporate governance and audit quality on tax aggressiveness with family ownership as the moderating variable. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 31-42.
- Purnomo, H., & Bernawati, Y. (2019). Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Efektivitas Internal Audit dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro journal of accounting*, 3(2), 1077-1089.
- Putra, P. D., Syah, D. H., & Sriwedari, T. (2018). Tax avoidance: Evidence of as a proof of agency theory and tax planning. *International Journal of Research & Review*, 5(9), 52-60.

- Rahayu, N. (2014). Evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61-78.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44-53.
- Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012). Tax planning and financial expertise in the audit committee. *Available at SSRN 2146003*.
- Siam, Y. A., Idris, M., & Al-Okdeh, S. (2018). The moderating role of family control on the relationship between audit committee financial expertise and earnings management. *International Journal of Business and Management*, 13(12), 31-37.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit quality: A synthesis of theory and empirical evidence. *Journal of accounting literature*, 23, 153.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *Accounting review*, 112-134.
- Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. (2018). Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness? *International Conference on Management Science and Engineering Management*,